

(Studi Sejarah dan Antropologi)

Oleh:

Andi M. Anwar Zaenong
Dosen IAIN Pare-Pare

Abstraksi

Barru merupakan daerah kabupaten di Sulawesi-Selatan berdiri di atas wilayah-wilayah secara kultural berbeda; *Tanete, Barru, Mallusetasi dan Soppeng Riaja*. Hal ini secara tradisional disebut "*Datu ri Tanete, Petta ri Berru sibawa Mallusetasi, Arung ri Soppeng Riaja*". Dengan demikian, Kabupaten Barru merupakan substansi bekas wilayah yang dipimpin beberapa Raja, sehingga sepanjang wilayahnya merupakan satu konfederasi disebut *passiajingeng* bahasa Bugis. Sistemnya dibingkai sejak pemerintahan kolonial disebut *Onderafdeling Barru*, dan sebelum statusnya beralih Kabupaten Barru menunjukkan diri terlepas dari Kabupaten Pare-Pare; waktu itu disebut *Kewedanaan Barru*. Oleh sebab itu, Kabupaten Barru tampaknya berbasis konseptual warisan kolonialisme, sehingga dengan semangat generasi berdarah golongan pribumi se wilayah Kabupaten Barru, di sini mengusulkan diadakannya perubahan nama ***Kabupaten Tanete Barru*** atau ***Kabupaten Patampanua Darussalam***.

Kata Kunci : *Reformasi Nama Kabupaten Barru*

A. Pendahuluan

Dalam sejarah tradisional mengenai Kabupaten Barru, secara umum belum dikenal bersama dengan keadaan formalnya seperti sekarang ini, kecuali sejarahnya dikenal daerah salah satu Kerajaan Otonom berdiri di atas kaki sendiri. Wilayahnya berbatasan dengan daerah kerajaan-kerajaan di sekitarnya; Tanete, Balusu, Soppeng dan Bone. Antara Kerajaan Barru dan Kerajaan Soppeng secara diplomatik jarang pernah bersahabat atau bekerjasama; adapun hubungannya dengan Kerajaan Bone dari padanya pernah bersengketa atau bertempur melawan pasukan *La Tenritata Arung Palakka*, dan kemenangan berada di pihak pasukan Kerajaan Bone.¹ Raja Barru dalam peperangan ini tewas dan dimakamkan di tempat bernama Bampa, sehingga beliau digelar *To Riwetta'E Arung Berru Matinro'e ri Bampa*.

Demikian kehadirannya dalam sejarah sebelum berkiprah mendahului kemerdekaan Republik Indonesia 1945, juga tidak dikenal banyak kecuali dengan sistem diperoleh berdasarkan kebijakan peninggalan Belanda sebagai sekarang disebut salah satu wilayah administratif pemerintahan kolonial di Sulawesi-Selatan yang berkedudukan di Sumpang Minanga'E, yaitu wilayah pada waktunya disebut

¹ Andaya, Y. Leonard. 2004. *Warisan Arung Palakka, Sejarah Sulawesi-Selatan Abad 17*. Makassar: Ininnawa, hal.

Onderafdeling Barru dan pejabatnya seorang Belanda digelar *PetoroE* atau istilah *Tuan Petoro* bahasa Bugis.

Itulah hal di atas, sejarahnya menarik dibahas tentang Kabupaten Barru, yakni menarik dikaji berdasarkan kebijakan politik pemerintahannya sepanjang mengurus beberapa wilayah, sehingga di sini faktanya salah satu sistem konfederasional yang maksudnya sama dengan istilah *passiajingeng* bahasa Bugis; artinya suatu persekutuan wilayah-wilayah.

Kabupaten Barru merupakan unitas kesatuan dari beberapa wilayah; terdiri atas daerah daerah bekas kerajaan tradisional yang sejatinya telah dikenal sebelumnya secara beranekaragam; Tanete, Barru, dan selainnya merupakan konfederasi bayangan kolonial setingkat kecamatan atau distrik, misalnya Soppeng Riaja dan Mallusetasi; yakni suatu wilayah swapraja atau swatantra dipimpin seorang kepala wilayah sebagai raja bayangan bergelar tradisional *Arung* dan kadangkala digelar *Petta*, tugasnya diberi wewenang untuk memerintah atau mengurus *dua tellu wanua* bahasa Bugis artinya beberapa distrik atau desa/kampung; di Soppeng Riaja yaitu Balusu, Kamiri-Takkalasi, Kiru-Kiru, Ajakkang, Siddo, Laboso/Mangkoso, Batupate dan Ceppaga.

Dalam silsilah keluarga *Arung Soppeng Riaja* terstruktur permulaannya seseorang mempunyai dua nama *La Enre* atau *La Tobo*,² ia adalah putra dilahirkan ayah kandung dalam hubungan perkawinan antara lk. *La Maddusila Baso Lawallu Petta Cambang* sebagai seorang keluarga konon berasal dari Selayar/Silaja, dan dengan pr. *I Ussu* di Kiru-Kiru yang berasal keluarga keturunan *Arung Lenrang* di bawah wilayah naungan Kerajaan Soppeng. Beliau memimpin pemerintahan swapraja/distrik bertempat di Wiringtasi/Lawallu dan Mangkoso sebagai pertama bergelar *Petta Coa*. Setelah itu, kekuasaan dijabat *La Maddiawe Petta Lawallu*, yakni putra dilahirkan dari perkawinan antara lk. *La Enre* atau *La Tobo* sebagai di atas dan dengan pr. *I Passire* yang berasal etnis Maraddia Mandar. Terakhir, yang ketiga Kepala Swapraja atau Swatantra dijabat *La Dagong Daeng Ngemba* atau *Haji M. Yusuf*, biasanya di masyarakat beliau disapa *Petta Soppeng*, salah seorang putra lk. *La Enre* atau *La Tobo* dalam hubungan perkawinan berikutnya dengan pr. *I Mappetangga*.³

Demikian di wilayah konfederasi kolonialisme di Kerajaan Nepo dan sekitarnya, meliputi beberapa kampung atau *dua tellu wanua* (Bugis) dibawah kekuasaannya yaitu Nepo, Palanro, Bojo, Bacukiki dan Soreang, yakni salah satu bekas konfederasional di bagian utara Kabupaten Barru disebut Swapraja/Distrik Mallusetasi di Kota Pare-pare. Dalam keluarga Raja Kerajaan Nepo *I Makung* putri kemanakan *I Sima Tana* digelar *Petta Tellu Latte'E* bukan kebetulan ia dipermaisuri seseorang Pejabat atau Pemangku

² Manuskrip Silzilah disusun Bau Pato di Istana Bola Maridi'E Kota Watang Soppeng, tth.

³ Manuskrip Silzilah disusun Andi Anwar Zaenong, Hasil Penelitian 2007 STAIN Pare-Pare, Tidak Dipublikasikan.

Kepala Swapraja *La Calo* yang berasal keluarga keturunan *Addatuang ri Sidenreng* bergelar tradisional *Petta/Arung Mallusetasi*.⁴

Dengan demikian, Kabupaten Barru, jikalau sejarahnya dikaji secara obyektif dan sejujur-jujurnya, tentu saja merupakan daerah satu-satunya kabupaten di Sulawesi-Selatan memiliki keunikan, disebabkan sedianya hanya daerah berkembang, yakni dari satu wilayah kerajaan kecil yang belum berpengaruh, tetapi dengan kiprahnya di kemudian hari terlihat sangat maju sejak pemerintahan Belanda di Sulawesi Selatan atau dimulai sejak tahun 1908. Di sini Kerajaan Barru perkembangannya dimulai dan telah berpengaruh, kalau saja dibandingkan dengan kekuasaan lain, misalnya kekuasaan dimiliki dua kerajaan tetangganya Tanete dan Suppa. Sehingga Kerajaan Barru termasuk wilayah berbagi untung dengan kebijakan pada era penjajahan di Nusantara, dan itulah prospek kebijakannya tetap dilanjutkan pada pemerintahan berikutnya yang bias kebijakan secara nasional, yakni siapapun pejabat bupati memerintah khususnya di Kabupaten Barru, tetap saja berkiprah mengikuti sistem pemerintahan Belanda di Sulawesi-Selatan, atau Kerajaan Barru mulai berkembang mengurus wilayah-wilayah selainnya sejak berada di bawah kebijakan pemerintahan kolonial di wilayah se Ajangtappareng, yakni dahulu wilayah setingkat dengan Kabupaten Daerah Tkt. II disebut *Afdeling Pare-pare*.

Adapun sementara wilayah di antara salah satu bawahannya di Kabupaten Barru secara administratif dikondisikan bersama untuk bersatu dengan daerah bekas kerajaan-kerajaan lainnya yang se Ajangtappareng disebut *Lima'E Akkarungeng*, yaitu, Suppa, Sidenreng dan Rappang, Sawitto dan Alitta; termasuk wilayah salah satu anggota di sekitarnya adalah daerah berdimensi keluarga kekerabatan, yaitu Kerajaan Maiwa dan Enrekang yang digelar *Tana ri galla' Tana ri abbusungi*.

Namun demikian, untuk mengenali istilah tradisional persekutuan wilayah-wilayah/*passiajingeng*, di Sulawesi-Selatan pada umumnya, adalah daerah bukan tradisinya diberi nama berasal dari salah satu bagian persekutuan wilayah yang semisal Kabupaten Barru, kecuali nama persekutuan diambil dapat bermakna sesuatu yang mencakup atau menyeluruh; namun maknanya tetap sejalan maksudnya, serta tujuan penggunaannya dengan istilah *passiajingeng*. Terjadi misalnya, di Kabupaten Sidrap (Sidenreng dan Rappang), Kabupaten Polmas (Polewali dan Mamasa), Kabupaten Pangkep (Pangkajene dan Kepulauan); semuanya secara eksis adalah daerah-daerah yang menggunakan nama persekutuan, di samping tujuannya tidak menghilangkan jejak sejarah lokalnya yang berbeda-beda di setiap wilayah; sebagaimana dalam prinsip bernegara di Indonesia adalah tidak sekadar wilayah diharapkan mengikuti misi persatuan dan kesatuan semata, tetapi juga diminta mempertahankan misinya sebagai wilayah bagian, sehingga untuk nama diberikan bukannya dapat membawa kehilangan budaya lokal, yakni terhadap jati diri di Kabupaten Barru hendaknya terjaga dan terpelihara di setiap wilayah.

⁴ Manuskrip Silzilah *Pangoriseng* disusun A. Ridha Mansur, Pensiunan Depsos Kabupaten Soppeng, tth.

Tetapi, masalah demi masalah sejak terbentuknya *Onderafdeling Barru*, di sini berarti juga wilayah bersifat konfederasional atau persekutuan seperti di atas, yakni wilayah pada permulaannya merupakan sistematika politik kolonial yang mungkin maksudnya untuk *try out*/percobaan, apabila masyarakatnya dapat dengan sukarela takluk tanpa masalah; sehingga Kabupaten Barru adalah suatu pemerintahan dalam administrasinya terdiri atas beberapa wilayah yang berasal dari beberapa negeri secara beranekaragam, yakni wilayah sebelumnya yang takluk di bawah kekuasaan kolonial dan di Kabupaten Barru sesudahnya seolah-olah di setiap wilayah menyerupai negeri-negeri federal; atau dari beberapa daerah bagian sesungguhnya berasal dari wilayah pemerintahan tradisional yang sangat berbeda; misalnya Kerajaan Tanete seharusnya lain, Balusu dan Nepo lain, serta Kerajaan Barru sendiri lain; dan perbedaannya itu merupakan karakter dan ciri khasnya dimiliki sendiri, di samping merupakan jati diri setiap warga yang sejalan dengan ideologi kebinekaan nasional Indonesia.

Oleh sebab itu, siapa saja bupati ditakdirkan memerintah di Kabupaten Barru, sebaiknya tidak bersifat oportunitas, penikmat dan pragmatis berkiprah, kecuali hendaknya bekerja keras dan jujur-sejujurnya, sehingga untuk memimpin di Kabupaten Barru tidak seterusnya daerah diperkenalkan hanya berasal dari nama salah satu wilayah. Dengan demikian, selain di sini beralasan tidak sekadar gampangnya divalidasi atau sekadar dapatnya diabsahkan; juga bukan karena perhitungannya selesai tanpa masalah. Atau, di samping nama dapat diperbolehkan sesuai peraturan dan hukumnya, juga sebagai nama tidak berasal dari salah satu daerah telah mewakili keseluruhannya seperti di Kabupaten Barru. Tentu auranya dapat berbeda, jika nama sebelum terpilih memang telah tersentuh sebagai wilayah bersifat komprehen, di mana maksud dan maknanya dapat diterima di semua wilayah.

Oleh sebab itu, secara konseptual Kabupaten Barru seharusnya diperdebatkan, sehingga namanya dapat sampai dengan makna yang mencakup seperti; istilah *Tellu Limpoe* atau *Patampanua Darussalam* dan sebagainya. Itulah pemerintah Kabupaten Barru dalam mengeluarkan kebijakan tidak selamanya bersifat terus-terusan bersifat sementara atau darurat, dan senantiasa terbius dengan perpanjangan kolonial; meskipun pemerintahnya belum mengenalnya bagaimana keaslian masing-masing wilayah disebut *memeng'É* bahasa Bugis artinya kebenaran sediakala. Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Barru bersahaja, kini belum dianggap telah meraih kemerdekaan sejati dari siasat pemerintahan terdahulu, kalau saja fenomenanya tampak berbasis nilai-nilai politik kolonialisme.

Dalam hal seperti di atas, Kabupaten Barru seolah suatu siasat politik sementara dipaksakan di atas wilayah lainnya, atau dalam perspektif kehidupan sosial politik dan bermasyarakat di Kabupaten Barru, adalah suatu masyarakat tidak mengenal diri dan belum menikmati kemerdekaan sejati, melainkan di hadapannya masih terbentang luas dengan praktek penjajahan bangsa sendiri, yakni suatu

tantangan politik di Indonesia disebut *New Colonialism* atau *Jajahan Belanda Baru*, dalam bahasa Bugis disebut *Balanda Malotong'E Matanna*.⁵ Tentunya seperti ini dapat lebih berbahaya bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka salah satu masalah sosial politik yang menantang kehidupan masyarakat, yakni sebab-sebab apa dan mengapa di Kabupaten Barru, kini belum terlihat usaha bagaimana pelestarian budaya masyarakat di setiap wilayah, walaupun sepanjang jalan telah tertata baik dengan lambang daerah yang berbasis budaya kerajaan, terdiri atas *dua tellu teddung makkatettongeng* bahasa Bugis, artinya beberapa payung telah berdiri secara tertutup; semuanya mempesona dan anggun di atas tugu berdiri di persimpangan empat Kota Barru.

Selain lambangnya dapat memberi makna suatu kebesaran dan keagungan, juga bermakna dengan sejumlah permasalahan lain; sejauh mana pemerintah Kabupaten Barru dapat telah membangun budaya di daerah, sehingga di wilayahnya sinkronik memiliki peradaban bernuansa budaya politik tradisional; atau terhadap nilai-nilai kesejarahan di Kabupaten Barru, di area ini setidaknya pemerintah daerah memiliki pandangan dan kesadaran sejuak sejak dahulu akan kebesaran daerahnya sendiri; yakni perspektif ketinggian martabat masyarakat Barru khususnya sebagai masyarakat yang mencintai nilai-nilai kearifan lokal yang sungguh dibanggakan dan menakjubkan di luar daerah.

A. Deskripsi Kebijakan Pemerintah Pusat Membentuk Wilayah Daerah Kabupaten Barru

Dalam kebijakan pembentukan wilayah dan lahirnya suatu Daerah Tkt. II di Sulawesi-Selatan, misalnya Kabupaten Barru, tidak sekadar kebijakan dapat dibuktikan dengan Undang-Undang dan Surat Keputusan Pemerintah, tetapi kebijakan terbentuknya akan lebih baik kalau dapat dikaitkan dengan sejarah dan budaya secara berkelanjutan, baik kebijakan berdasarkan pertimbangan sejarah lokal atau adat, maupun sejarah berbasis peninggalan kolonial.

Kebijakan untuk membentuk suatu daerah merupakan sketsa kebijakan politik pemerintah dapat bersifat dilematis, misalnya salah satu Daerah Tkt. II di Sulawesi-Selatan, mengapa nama diberi Kabupaten Barru yang lahir berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tkt. II Yo UU No. 1 Tahun 1957. Kemudian menyusul Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 28 Januari 1960 sebagai kebijakan nasional menunjuk seorang berpangkat *Letnan TNI Haji La Nakka* menjabat Kepala Daerah atau Bupati. Ia dilantik pada tgl. 20 Februari 1960, menunjukkan beliau tercatat Kepala Daerah Pertama di Kabupaten Barru. Ia sebelumnya Pejabat Kepala Kantor Veteran Republik Indonesia di Makassar.

Dengan demikian, melalui bukti pelantikan *Haji La Nakka* sebagai Kepala Daerah atau Bupati Barru, maka semua unsur dan syarat sebagai suatu daerah otonom berdiri dapat telah terpenuhi, termasuk

⁵ Artinya: Mereka disebut Orang Belanda tetapi Matanya berwarna Hitam, jadi maksudnya adalah orang Indonesia sendiri yang sementara menjajah bangsanya sendiri.

setiap unsur pemerintahan daerah yang terdapat di dalamnya; sehingga statusnya pada setiap lini, secara *de jure* dan *de facto* menunjukkan diri telah terlepas dari wilayah induknya Kabupaten Pare-Pare; yakni wilayah sebelum kemerdekaan 1945 wilayahnya setingkat Daerah Tkt. II atau kabupaten dalam bahasa Belanda disebut *Afdeling Pare-pare*. Struktural *afdeling* pejabatnya terdiri atas orang-orang Belanda digelar *Asisten Resident* di Pare-pare, sementara strukturalnya di daerah-daerah dibantu pejabat bergelar *Controleur* atau *Kontrolir*, yang kedudukannya merupakan bawahan diberi fungsi untuk membantu di wilayah-wilayah disebut *Onderafdeling*, antara lain di Barru sebagai pejabat pembantu yang diangkatnya berkedudukan di Sumpang MinangaE.

Setelah masa kemerdekaan 1945, maka istilah-istilah tersebut diganti dengan Kabupaten atau Daerah Tkt. II, pejabatnya seorang Bupati, Kepala Daerah atau Wali Kota. Di wilayah misalnya bekas *Onderafdeling Barru* sebelum terbentuknya Kabupaten atau Daerah Tkt. II terlebih dahulu digelar *Kewedanaan Barru*, pejabatnya seorang kepala wilayah disebut *Wedana* yang berfungsi Pembantu Kepala Daerah Kabupaten Pare-pare seperti halnya para camat di wilayah-wilayah; untuk jabatan di Barru pada waktu itu dijabat *Abd. Latif Daeng Massikki*.

Dengan demikian, persepsi kebijakan pemerintahan di Daerah Tkt. II misalnya di Barru sebelumnya merupakan wilayah salah satu *Onderafdeling*, kemudian statusnya dinaikkan di atas wilayah setingkat lebih tinggi dari pada sebelumnya wilayah yang sederajat dengan distrik atau kecamatan. Oleh sebab itu, Kabupaten Barru setelah dipimpin Bupati, dan wilayahnya berada di bawah Pemerintahan Daerah Tkt. I Provinsi Sulawesi-Selatan di Ujungpandang/Makassar, maka substansi sistem perbedaan kultural di wilayah-wilayah setelah di bawah administrasi Kabupaten Barru; semuanya diabadikan sebagai lambang daerah yang berazaskan berbagai budaya politik tradisional; terdiri atas 4 payung dibangun secara berdiri, terlipat atau tertutup, semuanya mempesona dengan indahnya di atas tugu terletak di pertengahan Ibu Kota Kabupaten Barru.

Tentu wilayah menjadi Kabupaten Barru selama ini dapat dinyatakan sejarahnya naik daun, setelah pada zaman kolonial merupakan wilayah berasal dari sebuah pemerintahan yang setingkat Daerah Tkt. II disebut *Afdeling Pare-Pare* sejak tahun 1908 M. Itulah sejarah dan kenyataannya Kabupaten Barru terwujud pembentukannya dengan dalil pelantikan Kepala Daerah sebagai di atas, dan sekaligus ditandai sejarah menunjukkan ***Hari Jadi Kabupaten Barru***.⁶

Oleh sebab itu, sebelum terbentuk Daerah Otonom Tkt. II di Sulawesi-Selatan oleh Pemerintahan Republik berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959, Kabupaten Barru adalah daerah terdiri atas empat wilayah memiliki perjalanan sejarah berliku-liku dan sarat penyimpangan budaya sejauh kemajemukan variabelnya secara silih berganti; yaitu disamping pernah bergelut istilah Distrik artinya Desa atau istilah *Wanua*

⁶Baca Berita Harian, Sejarah Kelahiran Barru “ Pare Pos “ Tgl. 20 Februari 2007.

bahasa Bugis, juga merupakan wilayah disebut Swapraja atau Swatantra artinya negeri bersifat otonom yang dalam bahasa Belanda disebut *Selfbestuur*. Itulah sebagai Daerah Tkt. II Kabupaten Barru; pada permulaannya terdiri atas beberapa kecamatan; Tanete, Barru, Soppeng Riaja, dan Mallusetasi, tetapi setelah diadakan pemekaran berdasarkan kebijakan pemerintah daerah, maka swapraja atau distrik yang kecamatan bekas Kerajaan Tanete telah dipecahkan menjadi Tanete Rilau, Tanete Riaja dan Pujananting, dan sementara Kecamatan Balusu terbentuk kemudian merupakan hasil pemekaran berasal dari 2 wilayah Kecamatan Induk; Barru dan Soppeng Riaja.

B. Analisa Sejarah Kabupaten Barru Beralasan Direformasi Tanete-Barru

Kabupaten Barru pada zaman sebelum kemerdekaan R.I. merupakan pemerintahan wilayah secara administratif berada dibawah salah satu bekas pemerintahan di Sulawesi-Selatan disebut *Afdeling* di mana pejabatnya seorang Belanda di Pare-Pere disebut *Gezaghebber*. Terhadap beberapa wilayah di Ajangtappareng tersebar wilayah-wilayah sebagai anggota atau bawahan, dan secara administratif di setiap daerah adalah wilayah berkedudukan di antara salah satu *Onderafdeling* setingkat dengan kecamatan dewasa ini, sehingga salah satunya wilayah berpusat di bagian selatan Pare-pare, tempatnya di Sumpang Minanga Barru.

Atau bukan kebetulan tempat selain bernama Sumpang Minanga, disebut pula Limpo Majang (bahasa Bugis artinya Kampung Kelapa, atau kampung sepertinya di Jawa Barat sama dengan Sunda Kelapa), tempat tersebut berbudaya di masyarakat sebagai Ibu Kota Kerajaan Barru Pesisir atau istilah *Berru Rilau* bahasa Bugis; di samping letaknya berdekatan dengan pantai (*Agang Je'ne* bahasa Makassar artinya daerah pantai) juga merupakan tempat kediaman raja terakhir Kerajaan Barru, *Ijanja Kalimullah Karaeng Lembang Parang*. Termasuk di sekitarnya berbudaya dengan lokasi pemakaman keluarga raja, misalnya *To/La Patarai Arung Berru* dan keluarga keturunannya. Ia seorang raja terkenal tampan gagah dan penganjur Islam yang menikah dengan keturunan *Arumpone / Baego Arung Macege*, dan dalam hubungan perkawinannya melahirkan *Raja We Tenri Padang Sultanah Aisyah Arung Berru* bergelar anumerta *Matinro ri Gowa*.⁷

Kerajaan Barru terletak di daerah pesisir pantai Selat Makassar, dan salah satu di antara kerajaan bersekutu dengan pihak kolonial, seperti halnya dengan kerajaan lainnya, Gowa, Bone, Sidenreng, Nepo, Laboso dan Batupute.⁸ Dengan demikian, potensinya dalam pemerintahan kolonial berbeda dengan dua-kerajaan tetangganya Tanete dan Suppa, sebagai keduanya kerajaan Bugis terkenal penantang utama

⁷ Manuskrip " *Silzilah Raja-Raja Se Wilayah Kabupaten Barru* " disusun A. Anwar Zaenong, Desember 2008.

⁸ Mattulada, 1993. *Latoa Suatu Analisis Terhadap Antropologi Orang Bugis*, (Ujungpandang: Hasanuddin University Press, h. 462.

terhadap isi Perjanjian Bongaya; dan sebab perjanjian tidak diterima dan itu merupakan pembangkangan yang membawa ekspedisi Belanda I (pertama) di Sulawesi-Selatan meledak pada tahun 1824.⁹

Kerajaan Suppa dan Tanete telah dikenal sejarah dengan kejayaan berbudaya dan pengaruhnya telah berkolaborasi dari luar, tetapi keduanya telah ditenggelamkan zaman dengan kehidupan politik berbasis kolonial; misalnya sebagai fakta di antara keduanya tidak tampil berpotensi diberi wilayah yang sama dan setingkat dengan daerah kabupaten tkt. II, sementara Kerajaan Barru dengan kesangsian peradabannya tidak lebih besar dan maju dibandingkan Tanete dan Suppa, tetapi demi pertimbangan kolonial, kultural Kerajaan Barru terangkat dan dinilai sederajat dengan kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi-Selatan, disebabkan sikap kesetiannya diutamakan berkompromi dengan pihak Belanda.¹⁰

Kabupaten Barru tidak sekadar menarik ditinjau dari segi kemajuan pembangunannya dalam berbagai bidang telah dicapai, tetapi dibalik kemajuan lainnya adalah kajian setiap wilayah dari aspek sejarahnya, sehingga wilayahnya berpotensi dibangun untuk kehidupan masyarakat lebih baik, jika Pemerintah Kabupaten Barru dapat membangun berdasarkan nilai-nilai sejarah dan budaya, sehingga kelak dalam pelaksanaannya dapat merupakan hasil implementasi historis sebagaimana dalam UU No 20 Th 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Indonesia, Yo UU No 7 Th 1992 dan UUD 1945 pasal 32.¹¹ Dalam teori sejarah sehubungan dengan masalah-masalah di Kabupaten Barru; peninggalannya merupakan bekas wilayah kerajaan memiliki kekayaan budaya, maka para sejarawan biasanya mengemukakan tesis di atas fakta-fakta, bahwa sejarah bukan mustahil tidak kembali berulang, atau sejarah tidak disebut sejarah kalau tidak kembali berputar ke asal muasalnya.¹² Dalam Alquran pada salah ayatnya dikatakan bahwa peredaran masa dalam hidup dan kehidupan manusia senantiasa silih bergantian¹³ dan bahasa Bugisnya disebut *sisule-sule ajewe lao riola*. Hal ini menunjukkan di dunia ini tidak ada yang abadi, final dan harga mati, kecuali perubahan; sehingga untuk berfikir dan berkaprach dalam kehidupan manusia sampai di akhir zaman kelak, perubahan itu suatu keniscayaan.

Negara Indonesia misalnya pada tahun 2020 ke atas telah cukup berumur lebih 75 tahun, maka perkiraan waktu menurut teori siklus yang diajarkan Ibn Khaldun,¹⁴ di Indonesia telah dapat diwaspadai akan menghadapi ancaman perubahan identitas termasuk di Kabupaten Barru.

⁹ Ibid. h.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Lihat Naskah, UUD 1945

¹² Lihat, Sumarni, *Sejarah Hukum*, (Rawamangun Jakarta: PT. Kharisna Putra Utama) Cet. I, h. 7. Dan lihat : M. Dien Majid & Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group). Cet. I. h. 173.

¹³ Lihat, Q.S., 03: 140

¹⁴ Majid, M. Dien & Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, (Depok: Prenada Media Group), Cet. I. h. 176

Demikian salah satu sentuhan sejarah digelar, sangat berhubungan dengan pesan-pesan orang Bugis berkata, “ *Narekko’ Narapi’ni Kajajian MappuralaloE Sipangumuruken Tauni Ettana, Narapini Wettunna Makkuling Parimeng* ”.¹⁵

Itulah Kabupaten Barru bersejarah bersama dengan keseluruhan peradabannya dapat lebih jauh kembali ditinjau ulang, atau kini sudah pada saatnya masyarakat dan pemerintah dapat diajak bersama untuk berkiprah, seperti apa dan bagaimana prospek masyarakat se wilayah Kabupaten Barru sebagai salah satu tempat dan wadahnya masyarakat untuk giat berbudaya, yakni masyarakat dibangun untuk bersama-sama berkiprah menuju kepada suasana integritas baru dibawa pergantian waktu dan generasi, serta berubahnya situasi dan kondisi masyarakat, antara lain diajak berkiprah menyelesaikan misalnya permasalahan nama **Kabupaten Barru** yang seharusnya telah dapat direformasi menjadi **Kabupaten Tanete Barru** ; tentu berbagai pertimbangan mendasar di sini dapat beralasan dengan fakta-fakta berasal dari berbagai daerah di Sulawesi-Selatan yang menggunakan sistem *passiajingeng* bahasa Bugis artinya konfederasi; yakni dari nama dipergunakan bersifat pragmatis, tetapi konsistensinya tetap sejalan dengan sejarah lokal di masing-masing wilayah. Misalnya Barru dalam perspektif pemerintahan daerah tingkat II adalah nama sesungguhnya tidak memberi makna apa-apa untuk mencakup keseluruhan wilayah, melainkan penggunaannya untuk sementara bersifat lokal dipergunakan pada masa pemerintahan kolonial, misalnya *Selfbestur Soppeng Riaja* menjadi distrik atau kecamatan Soppeng Riaja terbentuk di wilayah bekas Kerajaan Balusu, Kiru-Kiru dan sebagainya, *Selfbestur Mallusetasi* menjadi distrik atau kecamatan Mallusetasi terbentuk di wilayah bekas Kerajaan Nepo, Bacukiki, Palanro dan sebagainya. Adapun *Onderafdeling Barru* sesudahnya sebelum terbentuk Kabupaten Barru terlebih dahulu merupakan salah satu wilayah disebut Kewedanaan (Keresidenan) Barru. Pejabatnya digelar *Wedana* atau *Resident*, semuanya terbentuk di atas wilayah yang tidak sejenis, Tanete lain, Soppeng Riaja lain, dan sebagainya.

Oleh sebab itu, untuk menghubungkan antara teori sejarah dan permasalahan sosial politik di Kabupaten Barru; dan dengan tercapainya kebangkitan budaya dan kearifan lokal, sebagai berikut falsafah sejarah berkata; “ Biarlah sejarah yang membuktikan, kita harus belajar dari sejarah, sejarah adalah guru terbaik, kita harus bercermin pada sejarah, kemajuan suatu bangsa kini dan esok ditentukan sejarahnya, setiap manusia tidak bisa terlepas dari sejarah, dan sejarah mengajarkan sesuatu bagi kehidupan manusia kini dan esok.¹⁶ Dengan demikian, dalam budaya kehidupan manusia khususnya di Kabupaten Barru jangan hendaknya mengikuti tabiat seperti keadaan orang lain di kampung sendiri, atau jangan keadaannya seperti semangatnya orang-orang pendatang bekerja, sehingga tabiatnya dapat saja

¹⁵Artinya: Jika kejadian di masa lalu telah berjalan seumur usia manusia (75-100 th), maka kejadian itu akan kembali berulang. Bandingkan isyarat di atas dalam Sunah Rasulullah dalam A.J. Sinck, *Concordance Et Indices De La Tradision Mulimane*, (Leiden E.J. Brill, 1936), h. 324.

¹⁶ Lihat: Suyuti Pulungan, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2018) cet. I, h. 8.

menghianati sejarah, atau mereka sekadar dapat merusak sistem-sistem kehidupan sosial kemasyarakatan yang ada; sehingga di Kabupaten Barru tiada lagi pilihan kecuali terjadinya kerusakan budaya masyarakat, sehingga kerusakannya telah merata di mana-mana dapat meliputi sebagian atau seluruhnya.

Istilah *Pasijajingeng* di daerah lain tidak sepertinya di Kabupaten Barru dalam hal nama, misalnya *Tellu Pocco* adalah Bone, Soppeng dan Wajo, *Ajangtappareng* adalah Suppa, Sidenreng, Sawitto, Rappang dan Alitta. Demikian sistem konfederasional di Mallusetasi Pare-pare; yaitu Nepo, Palanro, Bojo', Bacukiki dan Soreang. Di Soppeng Riaja; yakni Balusu, Kiru-Kiru, Laboso, Ajakkang, Siddo dan Batu Pute. Juga istilah konfederasional selainnya, *Afdeling Tanete Barru* pada zaman kolonial dipandang sudah pernah terbentuk lebih dahulu selama setahun, namun berikutnya dihapus dengan terbentuknya *Onderafdeling Barru*, yakni suatu kebijakan struktural kolonial berikutnya yang berpusat di Sumpang Minanga Ibu Kota Kerajaan Barru.¹⁷

Terhadap sistem *pasijajingeng* di atas, semuanya diberi nama terbentuk sesuai dengan sistem konfederasional; namun di Kabupaten Barru tampaknya berbeda walaupun hasilnya sama-sama sebagai daerah-daerah konfederasional. Di Barru kekeliruannya dalam penggunaan nama hanya berasal dari salah satu wilayah induk dan dianggap telah dapat mewakili keseluruhannya, baik istilah dipergunakan sebagai sistem konfederasi kolonial maupun istilah dalam konfederasi nasional.

Dengan demikian, di Kabupaten Barru sekian lama sangat terkesan pejabatnya memerintah tidak terbiasa mengeluarkan kebijakan bersifat kultural budaya, kecuali mereka banyak berlaga seperti seorang politikus bersemangatkan penikmat dan oppurtunitas; tentu sifatnya mereka bukan putra daerah sungguhan yang sama saja dengan orang-orang lain yang didatangkan mengurus wilayah atau daerah, atau setidaknya mereka tidak berbeda dengan sistem penjajahan yang tidak mementingkan sejarah masyarakat sendiri dan budaya lokal. Mereka memang keluarga masyarakat Barru, tetapi pada dirinya belum memiliki tenaga SDM yang memahami tentang keaslian jati diri di setiap daerah disebut *Memeng'E* bahasa Bugis, kecuali sepengetahuannya mereka dibekali keinginan dan ambisi politik berlebihan; prinsip pekerjaannya mendahulukan kepentingan di atas kesempatan dan kesempatan orang lain, atau semuanya berkerja hanya untuk mengisi perjuangan hidup sementara demi keselamatan dirinya, keluarga dan golongan.

Tentu kehidupan di areal sosial kemasyarakatan sulit dikatakan tenaganya berkualitas manusia *To Mappedeceng* (bahasa Bugis), yakni sebagai orang-orang berbuat baik untuk menghidupkan substansi dan strategi kebinekaan antar daerah di Kabupaten Barru; mereka kehabisan minat untuk melihat obyek sejarah sebagai suatu nilai-nilai tradisional; atau mereka berpolitik sekadar tampak berguna dapat

¹⁷ Baca, Sejarah Kabupaten Barru, dalam " *Tabloid Keranjang* " Edisi Minggu II Maret 2010, h. 4

dibesarkan sendiri daerah; dan di atas beberapa wilayah dapat dengan sapurata dibiarkan banyaknya, keburukan dan kerusakan yang merajalela; yakni selain banyaknya sejarah lokal telah habis terlupakan, juga dampaknya telah memudarkan nilai-nilai budaya, terutama sistem politik tradisional.

Dalam hal ini, sebagai pesan-pesan politik tradisional orang Bugis sepanjang terkait hubungannya dengan kondisi sosial politik kemasyarakatan dewasa ini ; berkata "*Nerekko To Saliweng Yarega To Lain Riyala Mapparenta ri Wanua'E KampongngE, Engkaitu De' na Mappedeceng Yarega Engkami Bawang Makkasolang-solang*".¹⁸

Konsepsi kompetisional berpilkada misalnya merakyat atau *messeddi ada* bahasa Bugis yang menunjukkan dapat menyatu dengan rakyat, bekerja keras untuk rakyat, dan apa saja semuanya diangkat sebagai promosi pemilihan kepala daerah; semuanya itu berfungsi sekadar ikon-ikon berpolitik, dan di antara satu sama lainnya berguna hanya untuk menggalang suara, demi kepentingan yang tidak menghasilkan nilai-nilai budaya dan martabat yang dibutuhkan untuk membangun masyarakat.

Sehubungan dengan topik bahasan di atas, maka dalam ideologi dan falsafah politik tradisional di Kabupaten Barru, sebelumnya telah menunjuk adanya keanekaragaman raja-raja, keluarga bangsawan dan pemilik bumi sebagai pembesar disebut *To Battoa, To Maraja* atau *To Malompa, Tania To Baeccu* dan penguasa di wilayah-wilayah, berkata; "*Datu ri Tanete, Petta ri Berru dan Mallusetasi, Arung ri Soppeng Riaja*", maka sistematikanya menurut falsafah politik tersebut lebih dahulu dipertanyakan; mengapa *Datu* di Tanete, mengapa *Petta* di Barru dan mengapa *Arung* di Soppeng Riaja. Kesemuanya dijadikan indikator bahwa di setiap wilayah Kabupaten Barru sebelumnya memiliki keajaiban budaya luar biasa.

Berdasarkan visi-misi berbudaya dalam sistem politik tradisional sebagai digambarkan bentuknya beranekaragam, maka di Kabupaten Barru menunjukkan, bahwa di dalam masyarakat memahami adanya prinsip perbedaan dan persatuan dalam sistem hidup dan kehidupan sosial politik, yakni sebagai rakyat dan masyarakat dapat hidup berdampingan secara majemuk bernegara, dan suasanaanya hidup damai, aman dan tenteram. Tetapi, dibalik itu di Kabupaten Barru terdapat hal menarik ditelusuri jejaknya, dan hendaknya diperbaiki seluk-beluknya, yakni perspektif kehidupan masyarakat hendaknya dibangun dengan pendekatan sosio kultural. Dengan demikian, salah satu di antara kelalaian pemerintah daerah sejak lama dan kini telah diperlukan adanya tinjauan sejarah dan budaya, yakni representasi **Kabupaten Barru** selama ini salah satu di antara nama daerah di Sulawesi-Selatan bersifat konfederasional hendaknya dipertanyakan.

Itulah hal di masyarakat bersifat instan, seharusnya dipertanggung-jawabkan siapa saja bupati dan anggota dewan yang memerintah; di sini telah diajak berfikir secara kritis untuk mengadakan reformasi

¹⁸ Artinya: Jika orang lain atau orang berasal dari luar diangkat memerintah di kampung kita, itu tidak akan mendatangkan kebaikan kecuali memerintah dengan membuat kerusakan dalam negeri atau kampung.

tentang representasi salah satu peninggalan sejarah dan budaya, dan kebijakannya hendaknya ditinjau berdasarkan nilai-nilai budaya; jadi kritiknya bukan sekadar pemerintahnya dianggap bertindak apriori dengan kolonialisme, juga tindakannya boleh jadi tersangka lebih banyak berpartisipasi mendukung peninggalan Belanda, atau kebijakannya itu tidak membuat masyarakat dan setiap generasi di Kabupaten Barru sebagai generasi bangsa dapat cerdas berbudaya, karena para pendahulunya sendiri memang lebih disenangi bekerja sama dengan kolonialisme dari pada kebijakan yang berpihak memelihara nilai-nilai sejarah dan budaya.

Di masyarakat Kerajaan Balusu dipimpin seorang Raja bergelar *Sulle-datu*, ia sangat melaknat siapa saja manusianya bersahabat dengan Belanda; beliau berkata "*Nigi-Nigi Tau Rangengi La Pute-mata Mapparenta Pupuru' Sorokawui Padimurinna* ", maksudnya terhadap siapa saja memerintah, dan pemerintahannya sejalan dengan sistem penjajahan, maka terhadap generasi selanjutnya di kemudian hari akan dimusnahkan seperti keadaannya benda terbakar kelihatan musnah menjadi abu, *nauzubillah*.

C. Penutup

Dalam ikhtisar pembahasan nilai-nilai budaya di Kabupaten Barru, di sini pembahasannya berkiprah mengenai permasalahan sistem konfederasional dan terkait banyaknya alasan terhadap perubahan nama daerah, "*Barru Beralasan Nama Reformasi Kabupaten Tanete Barru* ", dikemukakan sebagai berikut:

1. Kabupaten Barru dalam administrasi pemerintahannya terdiri atas wilayah-wilayah secara konfederasional terbentuk sejak pemerintahan kolonial pada tahun 1908 disebut *Onderafdeling Barru* yang berada di bawah naungan wilayah persekutuan tradisional Ajangtappareng di Sulawesi-Selatan digelar *Afdeling Pare-Pare*. Demikian istilah kewedanaan/keresidenan Barru di bawah naungan Kabupaten Pare-pare.
2. Kabupaten Barru sebagai Pemerintahan Daerah Tkt. II berdiri di atas beberapa wilayah yang aspek kulturalnya masing-masing sangat berlainan; Tanete lain, Soppeng Riaja dan Mallusetasi lain, dan Barru sendiri lain; sehingga hubungan antara satu dengan selainnya merupakan suatu unitas kesatuan budaya terbentuk berazaskan falsafah perbedaan bineka tunggal ika. Dengan demikian, maka Kabupaten Barru beralasan untuk diadakan perubahan nama, kalau saja bukan nama diutamakan *Kabupaten Tanete-Barru*, juga dengan nama alternatif lainnya ditawarkan, *Kabupaten Patampanua Darussalam*.

Demikian kesimpulan menarik diperdebatkan untuk memilih alternatif perubahan nama yang sejalan dengan dalil-dalil sejarah dan budaya di Kabupaten Barru Sulawesi-Selatan.

Mangkasa, 07 Januari 2020

Daftar Pustaka

- A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Orang Bugis*, Ujungpandang: Lembaga Penerbitan UNHAS, 1985).
- A.J. Wensink, *Concordance Et Indices De La Tradision Muslimane*, (Leiden E.J Brill, 1936)
- Ahmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer*, Suatu Pengantar Kritis Paradigma, (Rawamangun Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Andaya, Y. Leonardo, *Warisan Arung Palakka Sejarah Sulawesi-Selatan Abad 17*, (Makassar: Inninawa, 2004). Cet. I.
- Jamali, Abdoel Rauf, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1999).
- M. Dien Majid & Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), Cet. I.
- Mattulada, *Latoa, Suatu Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, (Ujungpandang: Hasanuddin University Press, 1985).
- Stoddard, L., *Dunia Baru Islam*, (Jakarta : Panitia, 1966)
- Sunarmi, *Sejarah Hukum*, (Rawamangun Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). Cet. I.
- Suyuti Pulungan, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2018). Cet. I. .
-, Sejarah Kabupaten Barru, " *Tabloid Keranjang*", edisi Minggu 11 Maret 2010

Oleh:

***Kel. Wija Mabbulo Sibatang Mattulu TelluE Temmalara Arung Tompa Bulu Matajang Tanete Barru & Kel.
Wija Mattanete Lampe' To RiengkalingaE Adanna Matowa ri Kiru-Kiru/
Ponggawa ri Ajjakkang Soppeng Riaja***

**Drs. H. Andi M. Anwar Zaenong, M.A., M.Si
Dosen IAIN Pare-pare/Peneliti Masalah Sosial Politik Tradisional Kabupaten Barru**

Dalam sejarah tradisional mengenai Kabupaten Barru belum dikenal dengan keadaan formalitasnya seperti sekarang ini, kecuali sebagai sebuah Kerajaan Otonom yang bertetangga dengan Kerajaan-Kerajaan di sekitarnya; Tanete, Balusu, Soppeng dan Bone. Dan kehadirannya sebelum berkiprah mendahului kemerdekaan RI 1945, juga tidak dikenal banyak atau tidak secara luas dikenal, kecuali dengan sistem yang diperoleh berdasarkan peninggalan Belanda disebut wilayah *Onderafdeling Barru* yang berkedudukan di Sumpang MinangaE;

Itulah sepanjang kebijakannya sebagai suatu wilayah yang memimpin wilayah lainnya terlihat dengan sebuah sistem konfederasional atau *passiajingeng* bahasa Bugis, artinya dalam sistem pemerintahannya

memimpin wilayah-wilayah terdiri atas beberapa bekas kerajaan tradisional secara beranekaragam ; Tanete, Barru, dan selainnya (Balusu, Kiru-Kiru, Ajakkang, Sidde, Laboso / Mangkoso, Batupute dan Ceppaga) sebagai suatu sistem konfederasi kolonial bergelar Swapraja / Distrik Soppeng Riaja; dan adapun sisanya dari bekas Kerajaan Nepo, Palanro dan Bojo', Bacukiki dan Soreang dimasukkan ke dalam sistem konfederasional lainnya di bagian utara disebut Swapraja/Distrik Mallusetasi di Pare-Pare.

Dengan demikian, Kabupaten Barru jika dipandang secara historis obyektif, merupakan satu-satunya daerah kabupaten di Sulawesi-Selatan memiliki keunikan sejarah secara tidak obyektif, disebabkan dari sedianya satu kerajaan kecil yang tidak berpengaruh, tetapi dengan penjajahan Belanda di Sulawesi-Selatan sejak 1908, kiprahnya berkembang lebih besar dan statusnya sangat melaju sampai sekarang dibanding dengan Tanete, Suppa dan selainnya yang mestinya juga terangkat sebagai suatu nama kabupaten, Sehingga Kerajaan Barru dalam sejarah, termasuk wilayah yang berbagi untung dengan penjajahan, karena pemerintah daerah sampai sekarang ini tetap saja berpegangan dengan sistem peninggalan Belanda di Sulawesi-Selatan, atau bekas Kerajaan Barru mulai saja berkiprah sejak di bawah suatu wilayah pemerintahan Belanda yang setingkat Kabupaten dewasa ini disebut *Afdeling Pare-Pare*.

Namun demikian, berbicara dalam tradisional istilah persekutuan / *passiajingeng* pada umumnya tidak demikian adanya diberi nama misalnya Kabupaten Barru, terkecuali dengan istilah nama bersifat mencakup maknanya bersifat menyeluruh, misalnya Kab. Sidrap (Sidenreng dan Rappang), Kab. Polmas (Polewali dan Mamasa), Kab. Pangkep (Pangkajene dan Kepulauan), semuanya terlihat berbeda dengan konfederasi terbentuknya *Onderafdeling Barru* yang tidak melihat geologisnya, geografi dan antropoginya di mana terdiri juga atas beberapa wilayah berbasis negeri federasi atau negeri bagian; dimana seharusnya Tanete

lain, Balusu dan Nepo lain, serta Barru sendiri lain, sehingga bukan seharusnya dengan nama satu-satunya diberikan sebagai kabupaten yang digelar dengan suatu wilayah yang sudah mewakilkan semuanya, seperti di Kabupaten Barru ini.

Oleh sebab itu, dari nama Kabupaten Barru yang bekasnya salah satu *Onderafdeling* di bawah administrasi *Afdeling Pare-Pare*, sehingga olehnya bukan sekadar menarik dikaji. Itulah Barru berdasarkan sejarah sesungguhnya sudah harus kembali ditinjau untuk ke depannya berubah diberi nama **Kabupaten Tanete Barru**, karena demikian kebanyakannya istilah *passiajingeng* di Sulawesi-Selatan. Itulah di Kabupaten Barru bertentangan sekali dengan sistem pemberian nama, seperti misalnya *Tellu PoccoE* (Bone, Soppeng dan Wajo), *Ajangtappareng* (Suppa, Sidenreng, Sawitto, Rappang, Alitta), *Mallusetasi* (Nepo, Palanro, Bojo', Bacukiki dan Soreang), dan *Soppeng Riaja* (Balusu, Kiru-Kiru, Laboso / Mangkoso, Ajakkang, Ceppaga, Sidde dan Batupute), sehingga untuknya di Kabupaten Barru mengapa tidak demikian; sebabnya ada apa ? Menurut penulis mungkin sebabnya karena penguasa-penguasanya masih kental ke-Belanda-Belanda-annya yang perlu dipangkas kiprahnya . Istilah Tanete Barru sesungguhnya telah dipandang pernah terbentuk lebih dahulu selama setahun saja sebelum adanya *Onderafdeling* di Sumpang Minanga'E Ibu kota Kerajaan Barru dengan nama *Afdeling Tanete Barru*.

Bukankah itu semuanya tidak satupun diberi nama dalam sistem konfederasional, seperti di Daerah Barru yang merupakan satu kesatuan wilayah, tetapi yang sungguh berdasarkan gelar nama hanya dengan nama salah satu anggota yang dianggap mewakili keseluruhannya, baik istilah dalam konfederasi tradisional maupun istilah dalam konfederasi kolonial yang berikutnya diperpanjang lagi dengan konfederasi nasional, sehingga di Kabupaten Barru selama ini terkesan di antara penjabatnya hanya bergaya orang lain yang

merusak-rusak negeri, pendatang dan sekutu Belanda yang sepertinya tidak mau tahu tentang keaslian tradisional di sepanjang wilayah Kabupaten Barru, sehingga mereka di sini bukan rupanya memiliki tenaga SDM yang memahami betul keaslian jati dirinya di daerah yang disebut *memengE* bahasa Bugis, kecuali mereka merupakan SDM yang mendahulukan kepentingannya saja di atas kesempatan dan kesempitan, atau semuanya sekadar hidupnya hendak berpolitik yang berjuang hanya menyelamatkan diri, keluarga dan golongan; mereka tentunya sulit dikatakan tenaganya berkualitas untuk menghidupkan daerah Barru sebagai peninggalan tradisional *Ade'*, kecuali politiknya dijadikan jembatan untuk dibesarkan sendiri oleh daerah, dan dengan sapurata beberapa wilayah telah dibiarkan rusak dan membinasakan sistem politik tradisional *Ade'*.

Istilah merakyat atau *masseddi ada* menunjukkan menyatu dengan rakyat, cocok untuk rakyat, bekerja keras untuk rakyat dan segalanya dalam promosi pemilihan kepala daerah beberapa tahun lalu; semuanya itu hanya simbol-simbol belaka, dan diantara satu sama lainnya hanya berkekuatan politik kepentingan yang sama saja nilainya.

Sehubungan dengan pembahasan topik di sini, secara sistimatis terlebih dahulu dipertanyakan; apa dan mengapa dalam stereotipe politik tradisional se wilayah Kabupaten Barru, berkata "*Datu ri Tanete, Petta ri Berru, sibawa Mallusetasi, dan Arung ri Soppeng Riaja*". Dengan demikian, dari stereotipe tersebut di Kabupaten Barru senantiasa terenggam pertanyaan hendaknya terjawab sendiri mengapa *Datu* di Tanete, mengapa *Petta* di Mallusetasi dan Berru, serta mengapa *Arung* di Soppeng Riaja. Dan dari sinilah, di Kabupaten Barru memberikan petunjuk dengan keniscayaan adanya sistem politik budaya secara beraneka ragam, dan ditandai pula dengan lambang kebanggaan daerah terdiri atas 4 payung secara tertutup; dan dengannya lambang tersebut sungguh merupakan simbol kebesaran atau istilah *Arrajang* bahasa Bugis yang

mengalahkan daerah lain, dan dengan itulah simbolnya yang memberi tahu, bahwa Kabupaten Barru adalah miliknya Para Raja Pemiliknya Bumi yang sungguh di atasnya tidak boleh diterbitkan sertivikat sebagai hak milik pribadi, kecuali sertivitatnya bersifat hak pakai.. Bukankah dari keempatnya dipajang berdiri secara tertutup, berarti itu gejalanya ditunjukkan sendiri sebagai kerajaan-kerajaan yang tidak pernah tumbang. Demikian karena payungnya tertutup, maka hal itu gejalanya menunjukkan dari beberapa payung tersebut di kemudian hari akan kembali terbuka atau istilah *tabbuka riale* bahasa Bugisnya; dan terbukanya bukan seharusnya berasal dari keinginan pemerintah daerah, tetapi di sini sumbernya berasal sendiri dari keinginan keturunan yang menggunakan perjalanan sejarah dan geneologi berzilsilah.

Dengan demikian, Lembaga Adat di Kabupaten Barru adalah suatu organisasi sosial yang hanya berdiri berdasarkan inisiatif masyarakat adat sendiri, kebangkitannya dikawal oleh generasi messianisnya disebut “*Ompokenna Wija LawoE*” bahasa Bugis. Penulis sebagai generasinya yang putra daerah lahir di Mangkoso Kota Santri, Selasa 19 April 1957 yang sedang berkiprah bagaimana Lembaga Adat dikembangkan di Kabupaten Barru sejak tahun 2000-an

Di Kabupaten Barru yang dijadikan sebagai Lambang Daerah; terdiri atas 4 buah Payung yang berdiri dan tertutup, tentu dengan tertutupnya tidaklah berarti terus-terusan tertutup, melainkan dibalik itu akan kembali terbuka sendiri, setelah sejarahnya diperkirakan telah kembali berputar atau disebabkan beredar-nya masa yang mengembalikan segala sesuatu dapat berputar kepada asal-muasalnya. Dalam teori sejarah mengingatkan, tidaklah dikatakan sejarah kalau tidak dengannya kembali berulang.

Itulah kebesaran lambang di daerah Kabupaten Barru tidak berbanding lurus keagungannya dengan lambang lainnya di Sulawesi-Selatan; disebabkan simbolnya terpilih dengan sistem politik tradisional, dan

bukan seperti di daerah lain yang dibanggakan dengan kekayaan alamnya yang berpatamorgana, di antara pegunungan, persawahan, kebahariaan, dan industrialisasi, melainkan dari kebanggaannya itu dianggap mengalahkan daerah-daerah lainnya se Sulawesi-Selatan.

Barangkali ini merupakan fenomena sejak lama dirahasiakan Tuhan YME di Kabupaten Barru, karena di sini selain letaknya kebanyakan masalah kesejarahan yang hendaknya diadakan perbaikan, juga boleh jadi sekaligus ada hal yang hendaknya diperlihatkan secara takjub dan luar biasa, yakni dari paradigma masyarakat yang berasumsi *Dmpoke'na WijalawaE* bahasa Bugis disebut *Messianis* atau *Mujadid*, dan itu sama artinya *Al-Mahdi* yang memberi petunjuk berdasarkan Lontara Sulawesi-Selatan. Sesungguhnya dalam kebangkitannya ini luar biasa dan mengejutkan disebabkan versinya terkait sejarah yang hendaknya dimulai diluruskan di Kabupaten Barru; dan mengapa bukan seyogyanya dibangkitkan di daerah lain, Bone, Luwu, Gowa, Soppeng, Wajo dan sebagainya.

Dalam teori sosiologi barkata dimana Abu Jahal berada di situ ada Muhammad; di sinilah hikmahnya yang dirahasiakan Allah swt, mengapa kebangkitannya berpusat di Kabupaten Barru; disebabkan Kabupaten Barru adalah daerah sejarah yang paling bermasalah dibanding dengan yang lainnya di Sulawesi-Selatan; dan mengapa di Kabupaten Barru yang kebetulan pusatnya di Mangkoso Soppeng Riaja; dalam hal ini sebabnya sejarah peninggalan Belanda yang paling terparah di Kabupaten Barru tempatnya di Mangkoso Kota Santri. *Bumi La Tenri Sumpala Arung Labasa.*

Dengan demikian, bukankah dengan fenomenanya sendiri sekadar dikawal dengan penyimpangan politik, tetapi dibalik itu sesungguhnya adalah memancing postulat untuk kembali kepada sejarah politik tradisional atau *Pamngadereng*. Siapa tahu, barangkali didalamnya terdapat hikmah atau boleh jadi dengan

lambang tersebut, dijadikan alasan yang membawa Kabupaten Barru terkenal di Sulawesi-Selatan, yakni sebagai pusat dan ujung tombak terhadap reaktualisasi sistem politik kepada *Panngadereng*. Oleh sebab itu, kalau di Kabupaten Barru ini dengan sistem politik tradisionalnya benar-benar kembali ditegakkan dan jangan saja setengah hati, niscaya untuknya di daerah lain dengan mudah dikembalikan menurut sistem politik tradisional mereka masing-masing.

Oleh sebab itu, dalam rangka mengakhiri uraian di atas, alangkah baiknya para pembaca menyimak dan memahami sendiri maknanya dengan baik-baik atau sedalam-dalamnya, yakni dalam beberapa pesan di bawah ini;

“Aja’ Muengka Salaiwi Tanete, Narekko’ Engkani Titti’ Nari-onroi Titti’na, Narekko’ Engkni Moppang Narionroi Alekke’na.” Artinya: Janganlah kamu tinggalkan Tanete, jika telah miring tinggal-lah di pemiringannya.

“Lewa Mui Parimeng Tanete, Narekko’ Reweni Parimeng MemengE Arung/Datu ri Tanete.” Artinya : Tanete baru kembali seperti dahulu, kalau memang yang sesungguhnya Raja di Tanete kembali bertahta.

“Aja’ Muengka Salaiwi Tanete, Nasaba Seuwani Wetu Riala Onroang Madeppungenna Tauwe Bicara’ TongengngE” Artinya : Janganlah kamu tinggalkan Tanete, sebab Tanete akan dijadikan tempat membicarakan kebenaran.

“Aja’ Muengka Salaiwi Kiru-kiru, Narekko’ Engkani Titti’ Onroi Tittina, Narekko’ Engkani Moppang Onroi Alekke’na. Artinya : Janganlah engkau tinggalkan Kiru-kiru, jika Kiru-kiru telah miring ting-gallah di pemiringannya, dan jika tiarap tinggallah di punggungnya.

" Narekko Titti' WanuaE Berru Narionro'l Titti'na , Narekko' Engkani Moppang Narionroi Oppanna "

Artinya: Jika Berru telah miring tempatlah pemiringannya, dan jika tiarap tinggallah di tiarapannya.

" Narekko; Titti'ni WanuaE Nepo' Moppangni ri LainnaE " Artinya: Jika Nepo sudah miring maka negeri lainnya sudah tiarap.

" Nigi-Nigi Rangengi La Pute Mata Mapparenta Pupuru Soro Kawui Pagangkanna " Artinya: Barang siapa sebagai kawan Belanda memerintah, mereka akhirnya juga binasa sendiri, adalah berdosa terhadap adat yang disebut *Mabusung* bahasa Bugis.

Tentu saja berdasarkan variabel mengenai hal apa dianggap miring dan tiarap di dalam pesan-pesan di atas, yakni pada dasarnya menunjukkan bahwa negeri keseluruhannya sebagai bekas pemerintahan tradisional telah mengalami kerusakan sapurata, sehingga sebelum digilir dengan gerakan Penegakan Syariat Islam Khilafah di Sulawesi Selatan khususnya, adalah tidak lebih penting kecuali hendaknya lebih dahulu bertanya-tanya dan meminta restu kepada adat.

Dalam sejarah tradisional, Islam itu jangan memisahkan diri dari adat, karena Islam atau Sara' mustahil berhubungan dengan politik kalau bukan dengan kearifan lokal disebut *Panngadereng*. Itulah sebelum terjadi kerusakan adat sebagai gambaran di atas, terlebih dahulu diwasiatkan orang-orang tua, berkata:

" Narekko' seuwani wettu Makkompe'ni Ade'E, Masolanni Lipu'E, Sibalu'balu'ni Tauwe Siabelli-beliang, Ripaoppanni PalungengE Natuwoini Serri DapurengE, Ripatujuni SalaE Ripasalani TujuE:¹⁹ artinya, Jika adat

telah tidak tegak, maka rusaklah bumi atau kampung, pada orang-orang sudah berjual-beli (berekonomi), Lesung ditelungkupkan, dapur telah ditumbuhi rumput, yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan.

“Iyapatu Nakame’ Lino’ E, Narekko Purapi Rewe MemengE/ Ade’E Maparenta “. Artinya : Tidak bakal dunia kiamat kalau Adat belum dikembalikan memerintah. Dengan demikian, jangan hendaknya ada kekeliruan kita bernegara demokrasi; kalau misalnya ada prinsip berkata, Pancasila abadi, NKRI harga mati dan Republik Indonesia final, dan sebagainya, karena yang bisa mengatakan yang begituan hanya prinsip dalam berketuhanan menurut adat dan agama. Sekian,

Wasalam, 11 April 2019

BARRU BERALASAN DENGAN NAMA REFORMASI KABUPATEN TANETE BARRU

(Studi Sejarah dan Antropologi Politik)

Oleh:
DRS. H. ANDI M. ANWAR ZAENONG, M.A., M.Si
Dosen STAIN Pare-Pare
SUL-SEL

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
10 Februari 2016